

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi biasanya berhubungan erat dengan kenaikan atau peningkatan produksi barang dan jasa yang dapat diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan nilai tambah yang terbentuk dari keseluruhan kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah dengan rentang waktu tertentu (DIY Dalam Angka, 2001). Laju pertumbuhan PDRB merupakan salah satu indikator makro untuk melihat perkembangan perekonomian suatu daerah.

Perbedaan laju pembangunan antar daerah menyebabkan terjadinya kesenjangan kemakmuran dan kemajuan antar daerah (Kuncoro, 2004). Salah satu kebijakan yang diambil pemerintah untuk mempersempit ketimpangan regional yaitu diterapkannya kebijakan pembangunan daerah melalui konsep kawasan andalan, yang dilakukan berdasarkan potensi yang dimiliki daerah. Dengan kebijakan tersebut, diharapkan akan terjadi keseimbangan tingkat pertumbuhan dan pendapatan per kapita antar wilayah, sehingga dapat menutup atau paling tidak mempersempit *gap* perkembangan ekonomi antar daerah.

Setiap daerah hendaknya mampu mengoptimalkan semua potensi yang dimiliki oleh daerahnya masing-masing dan juga peran pemerintah harus mampu mendukung pembangunan di tiap-tiap daerah sehingga tujuan pemerataan

pembangunan dan hasil-hasilnya oleh pemerintah dapat dilaksanakan dengan baik. Kebijakan pemerataan dalam pembangunan daerah haruslah dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat di daerah, melalui pembangunan yang serasi dan terpadu antar sektor pembangunan daerah yang efektif dan efisien menuju tercapainya kemandirian daerah dan kemajuan yang merata. Kebijakan ini didukung oleh pertumbuhan yang terus membaik dari berbagai sektor ekonomi.

Tujuan pembangunan di samping mengandalkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan per kapita penduduk, juga harus memperhatikan proses distribusi nilai tambah yang terbentuk dalam kegiatan ekonomi di suatu wilayah. Peningkatan pendapatan per kapita dapat mencerminkan meningkatnya tingkat hidup tidak sertamerta dapat dinikmati oleh seluruh penduduk secara merata. Ketimpangan yang terjadi dalam masyarakat tidak dapat dipisahkan dengan masalah kemiskinan. Adanya kemiskinan ini mengakibatkan timbulnya keterbatasan penguasaan faktor-faktor produksi oleh sebagian masyarakat, sehingga kelompok tersebut memiliki akses yang rendah dan terbatas pada sumber-sumber pendapatan. Pada sisi lain, ada sekelompok penduduk yang memiliki akses yang besar terhadap sumber-sumber pendapatan dan beruntung memiliki pendapatan yang besar. Gejala ini menjadikan makin lebarnya kesenjangan pendapatan dalam masyarakat.

Ketimpangan ekonomi antar penduduk, antar sektor, maupun antar wilayah merupakan realitas dari pengelolaan pembangunan yang cenderung sentralistis selama ini. Ketidakserasian tingkat pertumbuhan dan kemajuan antar kawasan telah melahirkan kesenjangan antar daerah dan kawasan tersebut diperparah pula dengan

krisis multidimensional yang berkepanjangan. Beberapa daerah yang kondisi geografisnya sangat terisolir dan jauh dari aksesibilitas pembangunan, semakin menuai ketertinggalan akibat kebijakan pembangunan yang tersentralisasi maupun krisis multidimensional tersebut.

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari 4 kabupaten dan 1 kota yaitu Kabupaten Kulon Progo, Bantul, Gunungkidul, Sleman dan kota Yogyakarta. Ditinjau menurut kabupaten/kota, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2001 berkisar antara 1,80 persen hingga 2,70 persen. Pertumbuhan tertinggi dialami oleh Kabupaten Sleman, yakni mencapai 2,66 persen diikuti kota Yogyakarta sebesar 2,40 persen, Kabupaten Bantul 2,32 persen, Gunungkidul 2,07 persen, dan terendah terjadi pada Kabupaten Kulon Progo sebesar 1,82 persen (Indikator Ekonomi DIY, 2001). Di Kabupaten Kulon Progo tingkat perkembangan wilayah serta kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya relatif tertinggal bila dibandingkan dengan kabupaten lainnya. Perkembangan perekonomian daerah dapat dilihat dari perkembangan PDRB atas dasar harga konstan seperti Tabel 1.1 berikut ini :

**Tabel 1.1**

**PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 1993  
Tahun 2001-2003 (juta rupiah)**

Kabupaten	2001	2002	2003
Kulon Progo	359.651	369.546	381.842
Bantul	871.970	903.932	943.757
Gunungkidul	950.887	968.908	991.521
Sleman	1.509.835	1.578.886	1.649.080
Kota Yogyakarta	1.398.143	1.448.114	1.503.456

Sumber: BPS, *DIY Dalam Angka*, beberapa edisi.

Tabel 1.1 tersebut menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan di Kabupaten Kulon Progo lebih rendah bila dibandingkan dengan kabupaten lainnya. Selain itu, tabel diatas juga menunjukkan bahwa variasi PDRB antar kabupaten ternyata cukup besar. Kabupaten dengan PDRB tertinggi adalah Kabupaten Sleman yang mencapai 1.649.080 pada tahun 2003.

**Tabel 1.2**

**Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kulon Progo Tahun 1997-2003**

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)
1997	2,76
1998	-15,08
1999	-10,06
2000	1,98
2001	2,19
2002	2,49
2003	3,28

Sumber: BPS, *Kulon Progo Dalam Angka*, beberapa edisi.

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk melihat perkembangan suatu daerah. Laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kulon Progo tahun 1998 sebesar -15,08 persen lebih rendah dari tahun 1997 yang mencapai 2,76 persen. Hal ini disebabkan melandanya krisis ekonomi yang dimulai pada pertengahan tahun 1997. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kulon Progo tahun 2001 sebesar 2,19 persen. Pada tahun 2002 pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kulon Progo mencapai 2,49 persen, sedangkan tahun 2003 mengalami kenaikan

sebesar 3,28 persen. Angka ini tidak terlepas dari pengaruh pertumbuhan ekonomi masing-masing kecamatan di Kabupaten Kulon Progo.

Pertumbuhan ekonomi untuk tiap kecamatan di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2003 dapat dilihat pada Tabel 1.3.

**Tabel 1.3**

**Pertumbuhan Ekonomi Tiap Kecamatan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2003**

Kecamatan	Pertumbuhan Ekonomi (%)
Temon	3,22
Wates	2,34
Panjatan	3,19
Galur	2,91
Lendah	4,73
Sentolo	2,51
Pengasih	3,76
Kokap	3,16
Girimulyo	3,18
Nanggulan	3,62
Kalibawang	4,66
Samigaluh	4,31

Sumber: BPS, *Indikator Ekonomi Kabupaten Kulon Progo 2003*.

Berdasarkan dari 12 kecamatan yang ada, seluruhnya mempunyai angka pertumbuhan yang positif dengan pertumbuhan tertinggi dicapai oleh kecamatan Lendah yaitu 4,73 persen melampaui laju pertumbuhan Kabupaten Kulon Progo secara umum. Sementara itu, kecamatan yang melampaui pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kulon Progo tahun 2003 (3,28 persen) antara lain; kecamatan Pengasih (3,76 persen), kecamatan Nanggulan (3,62 persen), kecamatan Kalibawang (4,66 persen), dan kecamatan Samigaluh (4,31 persen). Bila dilihat dari Tabel 1.3

menyatakan adanya ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar kecamatan di Kabupaten Kulon Progo. Pertumbuhan ekonomi terendah terdapat di kecamatan Wates (2,34 persen), sedangkan pertumbuhan ekonomi tertinggi di kecamatan Lendah (4,73 persen).

Berdasarkan uraian tersebut maka judul dalam penelitian ini adalah **“Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Antar Kecamatan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 1998-2003”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka pokok permasalahan yang akan dibahas meliputi :

- a. bagaimana klasifikasi kecamatan di Kabupaten Kulon Progo berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita.
- b. bagaimana ketimpangan antar kecamatan di Kabupaten Kulon Progo.

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. untuk mengetahui klasifikasi kecamatan berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita di Kabupaten Kulon Progo,
- b. untuk mengetahui ketimpangan antar kecamatan di Kabupaten Kulon Progo.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

- a. bagi pemerintah Kabupaten Kulon Progo, dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam menyusun kebijakan dan strategi yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi daerah,
- b. sebagai bahan pembandingan terhadap penelitian-penelitian sejenis yang pernah dilakukan sehingga dapat memperkaya khasanah penelitian,
- c. bagi penulis, sebagai latihan dalam penerapan teori yang selama ini diajarkan dalam suatu penelitian ilmiah sekaligus sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam memperoleh gelar sarjana pada jurusan IESP, Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

#### **1.5. Kerangka Pemikiran Teoritis**

Menurut pandangan para ekonomi klasik (Adam Smith, David Ricardo, Thomas Robert Maltus, dan John Stuart Mill), maupun ekonom neoklasik (Robert Solow dan Trevor Swan), pada dasarnya ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu (1) jumlah penduduk, (2) jumlah stok barang modal, (3) luas tanah dan kekayaan alam, dan (4) tingkat teknologi yang digunakan (Sukirno,1985). Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau berkembang apabila tingkat kegiatan ekonominya lebih tinggi daripada apa yang dicapai pada masa sebelumnya.

Proses pembangunan ekonomi dipengaruhi oleh suatu kombinasi yang kompleks dari sejumlah faktor ekonomi, sosial termasuk pendidikan dan ketrampilan, demografi, geografi, politik, kebijakan ekonomi, dan faktor lainnya. Di dalam teori pertumbuhan ekonomi, faktor-faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah bisa dikelompokkan menjadi faktor dari sisi penawaran seperti progress teknologi, peningkatan sumber daya manusia, penemuan material baru, dan faktor dari sisi permintaan seperti peningkatan pendapatan dan perubahan selera konsumen.

Menurut Boediono (1985), pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan *output* per kapita dalam jangka panjang. Di sini, proses mendapat penekanan karena mengandung unsur dinamis. Para teoretikus ilmu ekonomi pembangunan masa kini, masih terus menyempurnakan makna, hakikat, dan konsep pertumbuhan ekonomi. Para teoretikus tersebut menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur dengan pertambahan PDB dan PDRB saja, tetapi juga diberi bobot yang bersifat immaterial seperti kenikmatan, kepuasan, dan kebahagiaan, dengan rasa aman dan tentram yang dirasakan masyarakat luas (Arsyad, 1999).

Kuznets yang telah berjasa besar dalam memelopori analisis pola-pola pertumbuhan historis di negara-negara maju mengemukakan bahwa, pada tahap-tahap pertumbuhan awal, distribusi pendapatan cenderung memburuk, namun pada tahap-tahap berikutnya hal itu akan membaik. Observasi inilah yang kemudian dikenal secara luas sebagai konsep kurva U-terbalik dari Kuznets (Todaro, 2000). Tingkat kesejahteraan ekonomi suatu daerah umumnya diukur dengan Produk Domestik



Regional Bruto per kapita. Di sisi lain, laju pertumbuhan PDRB merupakan indikator utama ekonomi sehingga merupakan target utama pembangunan setiap daerah. Sejalan dengan itu, penelitian tentang efektivitas pembangunan dalam pengentasan kemiskinan umumnya dilakukan dengan mengkaji hubungan antara tingkat kemiskinan dan pemerataan pendapatan dengan tingkat pendapatan per kapita atau laju pertumbuhan PDRB.

#### **1.6. Studi Empiris Sebelumnya**

Penelitian yang dilakukan oleh Sutarno (2002) mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banyumas sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan yang diukur dengan PDRB selama lima tahun (1996-2000) mengalami fluktuasi, terlebih pada tahun 1998 terjadi penurunan PDRB akibat krisis ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi yang pada tahun 1996 lebih 4 persen, pada tahun 1998 turun menjadi minus 6,8 persen walaupun pada tahun 2000 perekonomian sudah tumbuh positif 4,03 persen atas dasar harga konstan tahun 1993. Ketimpangan antar kecamatan yang terjadi di Kabupaten Banyumas dari tahun 1993 sampai dengan tahun 2000 cenderung meningkat. Nilai indeks Williamson pada tahun 1993 sebesar 0,35 naik menjadi 0,47 pada tahun 2000. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Setyorini di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 1983-1995. Penelitian yang dilakukan di Kabupaten Banyumas pada periode pengamatan 1993-2000, terjadi kecenderungan peningkatan ketimpangan baik dianalisis dengan indeks Williamson maupun dengan indeks entropi Theil.

Ketimpangan ini salah satunya disebabkan oleh konsentrasi aktivitas ekonomi secara spasial. Hipotesis Kuznets mengenai ketimpangan yang berbentuk kurva U-terbalik berlaku di Kabupaten Banyumas. Hal ini terbukti dari hasil analisis tren dan korelasi Pearson. Hubungan antara pertumbuhan dengan indeks ketimpangan Williamson dan entropi Theil untuk kasus Kabupaten Banyumas selama periode 1993-2000 menunjukkan berlakunya hipotesis Kuznets.

Penelitian yang dilakukan oleh M. Wahyuddin (2003) yang berjudul “Ketimpangan Spasial dan Perubahan Struktural Industri Manufaktur Berorientasi Ekspor (Indonesia, 1990-1999)” menerapkan analisis konsentrasi dan dispersi dilakukan dengan menggunakan indeks entropi Theil. Penelitian ini menitikberatkan pada daerah propinsi dan daerah kabupaten/kota sebagai wilayah terkecil dari daerah yang bersifat otonom. Analisis konsentrasi dan dispersi yang dilakukan dengan menggunakan indeks entropi Theil didasarkan pada ketimpangan antar pulau utama, antar propinsi, dan kabupaten/kota dalam propinsi.

Trend indeks entropi Theil atas industri manufaktur berorientasi ekspor di Indonesia memperlihatkan bentuk “U”. Ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Kuncoro (2002) untuk Indonesia pada pengamatan tahun 1976 hingga 1995. Penelitian Kuncoro menemukan bahwa trend indeks entropi Theil pada periode sebelum tahun 1988 memiliki pola menurun, kemudian cenderung naik setelah tahun 1988 sampai dengan 1995. Berbeda dengan penelitian Kuncoro, penelitian ini memperoleh temuan bahwa trend indeks entropi Theil pada periode sebelum tahun 1994 memiliki pola menurun, kemudian cenderung naik setelah tahun 1994 sampai

dengan tahun 1999. Pola menurun dari trend indeks entropi Theil pada periode sebelum tahun 1994, mencerminkan adanya peningkatan penyebaran industri manufaktur di Indonesia. Dengan kata lain, sampai dengan tahun 1994 terdapat bukti bahwa konsentrasi spasial cenderung menurun. Namun pola sebaliknya terjadi antara tahun 1994-1999, dimana konsentrasi spasial berfluktuasi sampai dengan tahun 1996, sedikit meningkat pada tahun 1996-1997 akibat deregulasi perdagangan, dan kemudian meningkat tajam pada masa krisis tahun 1997-1999. Ini mencerminkan menurunnya penyebaran industri manufaktur yang berorientasi ekspor pada seluruh kabupaten atau kota di Indonesia. Dengan kata lain, selama tahun pengamatan terdapat bukti bahwa konsentrasi spasial cenderung meningkat setelah diluncurkannya beberapa paket deregulasi tahun 1996-1997 dan mencapai klimaksnya pada saat terjadinya krisis.

Pantjar Simatupang dan Saktyanu K.Dermoredjo (2003) dalam penelitiannya yang berjudul “Produksi Domestik Bruto, Harga dan Kemiskinan : Hipotesis *Trickle Down* Dikaji Ulang”, menunjukkan hubungan parabolik antar persentase penduduk miskin dan produksi domestik bruto (PDB) per kapita dikaji ulang dengan mendisagregasi PDB menurut sektor. Dalam penelitian tentang efektivitas pembangunan dalam pengentasan kemiskinan umumnya dilakukan dengan mengkaji hubungan antara tingkat kemiskinan dan atau pemerataan pendapatan dengan tingkat pendapatan per kapita atau laju pertumbuhan PDB. Dalam konteks ini pandangan yang paling terkenal ialah hipotesis *trickle down* yang dilontarkan oleh Kuznets (1995) atau hipotesa U-terbalik yang mengatakan bahwa hubungan pendapatan per

kapita atau pertumbuhan PDB dengan tingkat kemiskinan atau pemerataan mengikuti pola parabola terbalik. Tingkat pendapatan dan jumlah penduduk miskin juga dipengaruhi oleh harga kebutuhan pokok yang menjadi penentu garis kemiskinan. Oleh karena itu, berbagai peubah harga diuji coba pula sebagai salah satu peubah penentu jumlah penduduk miskin.

## **1.7. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode yang meliputi:

### **1.7.1. Jenis dan Sumber Data**

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 1998 – 2003.

### **1.7.2. Metode Analisis Tipologi Daerah**

Analisis tipologi daerah digunakan untuk mengetahui klasifikasi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi dan pendapatan atau Produk Domestik Regional Bruto per kapita daerah. Dengan menentukan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebagai sumbu vertikal dan rata-rata PDRB per kapita sebagai sumbu horizontal, daerah dalam hal ini kecamatan yang diamati, dapat dibagi menjadi empat klasifikasi/golongan yaitu daerah/kecamatan yang cepat maju dan cepat tumbuh, daerah/kecamatan maju tapi tertekan, daerah/kecamatan yang berkembang

cepat, dan daerah/kecamatan yang relatif tertinggal (Sjafrizal, 1997 ; Kuncoro dan Aswandi, 2002).

Kriteria yang digunakan untuk membagi daerah/kecamatan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) kecamatan cepat maju dan cepat tumbuh, kecamatan yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang lebih tinggi dibanding rata-rata kecamatan di Kabupaten Kulon Progo; (2) kecamatan maju tapi tertekan, kecamatan yang memiliki pendapatan per kapita lebih tinggi, tetapi tingkat pertumbuhannya lebih rendah dibanding rata-rata kecamatan di Kabupaten Kulon Progo; (3) kecamatan berkembang cepat, adalah kecamatan yang memiliki tingkat pertumbuhan tinggi, tetapi tingkat pendapatan per kapita lebih rendah dibanding rata-rata kecamatan di Kabupaten Kulon Progo; (4) kecamatan relatif tertinggal adalah kecamatan yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang lebih rendah dibanding rata-rata kecamatan di Kabupaten Kulon Progo. Disebut “tinggi” apabila indikator di suatu kecamatan lebih tinggi dibandingkan rata-rata seluruh kecamatan di Kabupaten Kulon Progo; digolongkan “rendah” apabila indikator di suatu kecamatan lebih rendah dibandingkan rata-rata seluruh kecamatan di Kabupaten Kulon Progo.

Kecamatan yang termasuk kategori kecamatan yang maju dan tumbuh cepat ini pada umumnya merupakan daerah yang maju dari segi pembangunan maupun kecepatan pertumbuhan. Kecamatan yang termasuk maju tapi tertekan adalah daerah/kecamatan yang relatif maju tetapi dalam beberapa tahun mengalami pertumbuhan yang relatif kecil, akibat tertekannya kegiatan utama kecamatan yang

bersangkutan. Kecamatan yang berkembang cepat adalah kecamatan yang mempunyai potensi yang besar tetapi belum diolah secara baik, sehingga meskipun pertumbuhannya cepat tetapi pendapatannya masih dibawah pendapatan rata-rata kabupaten. Kecamatan dengan kategori relatif tertinggal adalah kecamatan yang secara ekonomis sangat tertinggal, baik dari segi pertumbuhan ekonomi maupun pendapatan per kapita, atau dengan kata lain kecamatan yang paling buruk keadaannya dibandingkan dengan kecamatan lain dalam suatu kabupaten.

### 1.7.3. Indeks Ketimpangan Williamson

Williamson (1965) meneliti hubungan antara disparitas regional dengan tingkat pembangunan ekonomi, dengan menggunakan data ekonomi daerah yang sudah maju dan yang sedang berkembang. Ditemukan bahwa selama tahap awal pembangunan, disparitas regional menjadi lebih besar dan pembangunan terkonsentrasi di daerah-daerah tertentu. Pada tahap yang lain dilihat dari pertumbuhan ekonomi, tampak adanya keseimbangan antar daerah dan disparitas berkurang dengan signifikan.

Ketimpangan pembangunan antar kecamatan yang terjadi di Kabupaten Kulon Progo tahun 1998-2003, dapat dianalisis dengan menggunakan indeks ketimpangan regional yang dinamakan indeks ketimpangan Williamson (Sjafrizal, 1997) :

$$IW = \frac{\sqrt{\sum (Y_i - Y)^2 f_i / n}}{Y}$$

di mana:

IW= indeks ketimpangan Williamson

$Y_i$  = PDRB per kapita di kecamatan  $i$

$Y$  = PDRB per kapita rata-rata Kabupaten Kulon Progo

$f_i$  = jumlah penduduk di kecamatan  $i$

$n$  = jumlah penduduk Kabupaten Kulon Progo.

Besar kecilnya ketimpangan PDRB per kapita antar kecamatan memberikan gambaran tentang kondisi dan perkembangan pembangunan di Kabupaten Kulon Progo, untuk memberikan gambaran yang lebih baik tentang kondisi dan perkembangan pembangunan daerah di wilayah Kabupaten Kulon Progo, akan dibahas pemerataan PDRB per kapita antar kecamatan yang dianalisis dengan menggunakan indeks ketimpangan Williamson dan indeks entropi Theil. Angka indeks ketimpangan Williamson yang semakin kecil atau mendekati nol menunjukkan ketimpangan yang semakin kecil, atau dengan kata lain makin merata, dan bila semakin jauh dari nol menunjukkan ketimpangan yang semakin lebar.

#### **1.7.4. Indeks Ketimpangan Entropi Theil**

Menurut Kuncoro (2002), konsep entropi Theil dari distribusi pada dasarnya merupakan aplikasi konsep teori informasi dalam mengukur ketimpangan ekonomi dan konsentrasi industri. Studi empiris yang dilakukan Theil dengan menggunakan indeks entropi menawarkan pandangan yang tajam mengenai pendapatan regional per kapita dan kesenjangan pendapatan, kesenjangan internasional, serta distribusi produk

domestik bruto dunia. Indeks entropi Theil dapat dibagi menjadi dua sub indikasi, yaitu ketimpangan regional dalam wilayah dan ketimpangan regional antar wilayah atau regional. Dengan menggunakan alat analisis indeks entropi Theil akan diketahui ada tidaknya ketimpangan yang terjadi di Kabupaten Kulon Progo. Rumus dari indeks entropi Theil adalah sebagai berikut:

$$I(y) = \sum (y_j/Y) \times \log[(y_j/Y)/(x_j/X)]$$

di mana :

$I(y)$  = indeks entropi Theil

$y_j$  = PDRB per kapita kecamatan j

$Y$  = rata-rata PDRB per kapita Kabupaten Kulon Progo

$x_j$  = jumlah penduduk kecamatan j

$X$  = jumlah penduduk Kabupaten Kulon Progo.

Indeks entropi Theil memungkinkan kita untuk membuat perbandingan selama kurun waktu tertentu. Indeks ketimpangan entropi Theil juga dapat menyediakan pengukuran ketimpangan secara rinci dalam sub unit geografis yang lebih kecil, yang pertama akan berguna untuk menganalisis kecenderungan konsentrasi geografis selama periode tertentu; sedang yang kedua juga penting ketika akan mengkaji gambaran yang lebih rinci mengenai ketimpangan spasial. Sebagai contoh ketimpangan antar daerah dalam suatu negara dan antar sub unit daerah dalam suatu kawasan (Kuncoro, 2002).

Indeks entropi Theil yang semakin membesar menunjukkan ketimpangan yang semakin membesar pula. Demikian pula sebaliknya, bila indeksnya semakin



kecil, maka ketimpangan akan semakin rendah/kecil atau dengan kata lain semakin merata. Indeks ketimpangan entropi Theil tidak memiliki batas atas atau batas bawah, hanya apabila semakin besar nilainya maka semakin timpang dan semakin kecil semakin merata.

### 1.8. Definisi Operasional

Dalam melakukan studi empiris tentang Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Antar Kecamatan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 1998-2003, maka data yang digunakan harus jelas definisinya sehingga dapat menghasilkan analisis yang tepat. Ada pun definisi operasional penelitian adalah:

- a. pertumbuhan ekonomi daerah (rog) dihitung dengan:

$$\text{Rog} = \frac{\text{PDRB}_t - \text{PDRB}_{t-1}}{\text{PDRB}_{t-1}} \times 100 \%$$

di mana:

$\text{PDRB}_t$  = Produk Domestik Regional Bruto pada tahun t

$\text{PDRB}_{t-1}$  = Produk Domestik Regional Bruto pada satu tahun sebelum tahun t

- b. Pendapatan per kapita (Ykapita) dihitung dengan :

$$\text{Ykapita} = \text{PDRB} / \text{jumlah penduduk}$$

### **1.9. Sistematika Penulisan**

Sistem penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab dengan pembagian sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Pendahuluan berisikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran teoritis, studi empiris sebelumnya, metodologi penelitian, definisi operasional dan sistematika penulisan.

**BAB II : LANDASAN TEORI**

Dalam bab ini akan diuraikan tentang teori pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan antar kecamatan.

**BAB III : GAMBARAN UMUM**

Gambaran secara umum mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

**BAB IV: ANALISIS DATA**

Dalam bab ini akan disajikan analisis data dan penjelasan hasil pengolahan data.

**BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil analisis yang dilakukan.